

## ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN REALISASI DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK (Studi Kasus Pembangunan Fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2017-2024)

Refi Bakarbesy<sup>1</sup>, Daisy S.M. Engka<sup>2</sup>, Wensy F. I. Rompas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail: [refibakarbesy8@gmail.com](mailto:refibakarbesy8@gmail.com)

### ABSTRAK

Infrastruktur jalan merupakan komponen strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara menghadapi tantangan kompleks dalam perencanaan dan realisasi pembangunan fisik jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan fisik jalan di Kota Manado tahun 2017–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen resmi dari Dinas PUPR Kota Manado, dengan menggunakan rasio efektivitas sebagai alat ukur utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran pembangunan jalan setiap tahun secara konsisten mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sehingga dikategorikan sangat efektif. Alokasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp21,6 miliar, sementara terendah pada tahun 2022 sebesar Rp199,7 juta akibat realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Kendala seperti keterbatasan anggaran, kondisi cuaca ekstrem, kontur lahan yang bervariasi, dan sengketa lahan dapat diatasi melalui koordinasi antarinstansi yang baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado telah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan secara efektif, ditandai dengan bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik, meningkatnya konektivitas antarwilayah, serta menurunnya proporsi jalan rusak berat.

**Kata Kunci :** Perencanaan Pembangunan, Realisasi Anggaran, Efektivitas, Pembangunan Jalan, Kota Manado

### ABSTRACT

*Road infrastructure is a strategic component in supporting regional connectivity, community mobility, and local economic growth. The Manado City Government, as the capital of North Sulawesi Province, faces complex challenges in planning and realizing physical road construction. This study aims to analyze the effectiveness of budget utilization in implementing physical road construction in Manado City from 2017 to 2024. A descriptive qualitative approach was employed through library research and analysis of official documents from the Manado City Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), using an effectiveness ratio as the primary measurement tool. The results indicate that the annual budget realization for road construction consistently reached 100% of the established targets, categorizing it as highly effective. The highest budget allocation occurred in 2018 at IDR 21.6 billion, while the lowest was in 2022 at IDR 199.7 million due to budget reallocation for COVID-19 pandemic response. Constraints such as budget limitations, extreme weather conditions, varying land contours, and land disputes were managed through effective inter-agency coordination. This study concludes that the Manado City Government has effectively implemented road infrastructure development, marked by an increase in the length of roads in good condition, improved inter-regional connectivity, and a decline in the proportion of severely damaged roads.*

**Keywords:** Development Planning, Budget Realization, Effectiveness, Road Development, Manado City

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara dengan wilayah yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam menyelaraskan agenda pembangunan di seluruh daerahnya. Pemerintah daerah berperan krusial dalam merancang dan mengelola inisiatif pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi setempat, potensi daerah, serta aspirasi masyarakat. Mengingat setiap wilayah memiliki prioritas pembangunan yang berlainan, maka proses perencanaan harus dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur memerlukan koordinasi yang efektif untuk meminimalkan hambatan teknis, keterbatasan sumber daya, serta kendala administratif.

Pembangunan fisik merupakan salah satu komponen strategi dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai, sebagai bagian dari infrastruktur publik, memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran mobilitas penduduk, arus transportasi, serta distribusi barang dan jasa. Ketersediaan jalan yang layak dan terintegrasi tidak hanya

memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah dan ekonomi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan kawasan, membuka pusat-pusat kegiatan baru, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah. Pada skala nasional, infrastruktur pembangunan diposisikan sebagai instrumen utama untuk memperkuat daya saing daerah, menekan melemahnya pembangunan antarwilayah, serta menciptakan pemerataan akses pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan fisik pada tingkat daerah memerlukan perencanaan yang matang dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah. Proses perencanaan infrastruktur jalan harus mempertimbangkan penentuan prioritas pembangunan, kelayakan teknis, pemilihan lokasi, hingga sinkronisasi dengan kapasitas anggaran dan pelaksanaan. Perencanaan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat keberhasilan realisasi pembangunan, karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, koordinasi antar instansi, serta efektivitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, keterpaduan antara rencana dan realisasi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan fisik daerah (Putri, 2018).

Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mengarahkan keberhasilan pembangunan karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Keragaman kondisi wilayah menuntut penyusunan program yang benar-benar selaras dengan potensi lokal serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Perumusan kebijakan pembangunan tidak dapat disamakan antar daerah sehingga pemerintah perlu memastikan adanya strategi yang tepat, terutama pada wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya, kendala teknis, serta aksesibilitas yang rendah. Situasi tersebut menampilkan pentingnya perencanaan yang realistis serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan fisik mencapai target yang telah ditetapkan (Sibali, 2025)

Perencanaan pembangunan memerlukan pendekatan yang sistematis agar tujuan pembangunan tercapai secara efektif. Penyusunan rencana membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sehingga arah kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonom yang memberi ruang untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuai kapasitas wilayah masing-masing. Penyelarasan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, serta visi pembangunan menjadi aspek kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Proses perencanaan yang bersifat partisipatif terbukti mampu memperkuat efektivitas strategi pembangunan serta meningkatkan kualitas keputusan pembangunan (Kodoatie, 2010)

Pemantauan hasil pembangunan menjadi langkah penting untuk memastikan apakah program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap kegiatan fisik yang direalisasikan dievaluasi melalui indikator yang menekankan pencapaian keluaran, keberlanjutan, dan dampak bagi warga. Evaluasi tersebut menggambarkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Penilaian kinerja diperlukan untuk melihat sejauh mana sumber daya publik dimanfaatkan secara efisien dan akuntabel sebagai dasar perbaikan pembangunan pada periode berikutnya (Widodo, 2011)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan tersebut bertujuan mencapai efektivitas, efisiensi, dan sasaran yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan. Prosesnya menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal dan pengalokasian sumber daya secara optimal agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana pembangunan yang efektif mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan fisik, seperti yang terjadi di Desa Mokupa, Kabupaten Minahasa, di mana optimalisasi potensi lokal serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang berperan besar dalam keberhasilan pembangunan (Panggabean, 2023). Tingkat pencapaian pembangunan dapat dievaluasi melalui perbandingan antara target yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan dan realisasi yang dicapai, baik dari aspek fisik (output) maupun penggunaan anggaran (input). Kinerja pembangunan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kapasitas kelembagaan, kecukupan pendanaan, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian. Pada praktiknya, berbagai tantangan sering muncul, seperti ketidaktepatan waktu pelaksanaan, keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah, hingga kondisi lapangan yang dinamis. Oleh karena itu, perencanaan dan realisasi pembangunan merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat juga

mempengaruhi keberhasilan pembangunan di tingkat lokal, terutama dalam memastikan implementasi program berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan (Soares, 2015).

Kota Manado menunjukkan kebutuhan penanganan pembangunan fisik jalan yang semakin kompleks. Kota ini berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi Provinsi Sulawesi Utara sehingga jaringan jalan menangani beban mobilitas yang tinggi. Pembangunan dan perbaikan jalan menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena mempengaruhi transportasi masyarakat, efisiensi kegiatan distribusi, serta konektivitas berbagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pembangunan jalan ditentukan oleh ketepatan perencanaan, ketelitian dalam menetapkan lokasi perbaikan, dan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan kerusakan riil di lapangan. Kualitas hasil pembangunan hanya dapat tercapai jika perencanaan dan pelaksanaannya berjalan selaras, terutama di wilayah dengan intensitas lalu lintas tinggi seperti Kota Manado. Untuk melihat bagaimana pencapaian pembangunan jalan dalam beberapa tahun terakhir, berikut disajikan data realisasi pembangunan jalan Kota Manado dari tahun 2017–2024.

**Tabel 1 Realisasi Pembangunan fisik Jalan Di Kota Manado 2017-2024**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	6.458.273.500	6.458.273.500
2	2018	21.625.879.379	21.625.879.379
3	2019	6.925.369.285	6.925.369.285
4	2020	598.152.741	598.152.741
5	2021	1.093.035.000	1.093.035.000
6	2022	199.750.000	199.750.000
7	2023	3.460.859.052	3.460.859.052
8	2024	1.076.156.552	1.076.156.552

*Sumber : PUPR Kota Manado (2024)*

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran pembangunan jalan di Kota Manado selalu mencapai 100% dari target yang ditetapkan selama periode 2017–2024. Konsistensi penyerapan anggaran tersebut mencerminkan bahwa secara administratif pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, dengan nilai realisasi tertinggi yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp21.625.879.379 dan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar Rp598.152.741. Besarnya realisasi pada tahun 2018 dan 2023 menunjukkan peningkatan kebutuhan pembangunan jalan pada tahun-tahun tersebut, sedangkan rendahnya realisasi pada tahun 2020 berpotensi dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang menyebabkan pergeseran prioritas anggaran. Capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas pembangunan fisik jalan di lapangan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas dan kondisi infrastruktur jalan di Kota Manado.

Proses perencanaan yang efektif menuntut adanya integrasi yang kuat antara dokumen perencanaan dan realisasi pelaksanaan agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Realisasi pembangunan mencerminkan implementasi dari rencana yang meliputi pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam konteks pembangunan fisik, termasuk jalan, keselarasan antara perencanaan dan realisasi menjadi faktor kunci dalam memastikan pembangunan benar-benar mendukung perkembangan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami sejauh mana efektivitas proses perencanaan dan realisasi pembangunan jalan fisik yang dapat dicapai di wilayah perkotaan seperti Kota Manado.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang optimal guna mencapai tujuan pembangunan dengan

efisiensi dan efektivitas maksimal, sambil memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang ada. Proses tersebut mencakup pengelolaan serta pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui tahapan perencanaan yang terstruktur, implementasi, serta penilaian hasil. Menurut Todaro & Smith (2020), perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mentransformasikan struktur ekonomi dan sosial masyarakat melalui produksi yang berkelanjutan dan distribusi sumber daya yang adil.

## **2.2 Teori Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis yang mencakup tahapan perencanaan, implementasi, serta penilaian terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan pada tingkat daerah, dengan maksud untuk merealisasikan target pembangunan yang telah ditentukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi dkk. (2007), perencanaan pembangunan daerah dapat dipahami sebagai proses penyusunan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), yang bertujuan untuk mengoptimalkan serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu wilayah atau daerah dalam periode waktu tertentu. Menurut Soares (2015), prinsip-prinsip perencanaan pembangunan meliputi: partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terpadu menyatukan sektor dan wilayah, berkelanjutan: memperhatikan kelangsungan jangka panjang, transparan dan akuntabel, dan realistis dan terukur. Menurut Rustiadi dkk. (2019), perencanaan pembangunan daerah merepresentasikan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan delegasi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara otonom, termasuk dalam aspek perencanaan pembangunan. Sjafrizal (2020), perencanaan pembangunan daerah yang efektif setidaknya harus memuat empat elemen utama, yakni: (1) Menetapkan tujuan serta sasaran pembangunan yang jelas dan terukur; (2) formulasi strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut; (3) penyusunan kebijakan sebagai kerangka umum untuk mengimplementasikan strategi; serta (4) perencanaan program dan kegiatan yang lebih spesifik dan operasional.

## **2.3 Teori Realisasi Pembangunan**

Menurut Darmawan (2021), realisasi merupakan proses penerapan rencana yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam bentuk tindakan nyata, yang mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, realisasi pembangunan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan rencana kerja dan anggaran, baik dari segi serapan anggaran maupun capaian fisik kegiatan. Realisasi pembangunan tidak hanya sebatas pada pelaksanaan proyek fisik, tetapi juga mencakup aspek pengawasan, pelaporan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Tanpa realisasi yang baik, perencanaan pembangunan hanya akan menjadi dokumen tanpa nilai praktis.

## **2.4 Pembangunan Fisik**

Pembangunan fisik merujuk pada bentuk pembangunan yang dapat diidentifikasi melalui hasil-hasil yang teramati secara fisik seperti infrastruktur, fasilitas publik, bangunan, serta sarana prasarana lainnya. Menurut Wurara (2020), pembangunan fisik merupakan proses transformasi yang dirancang untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam bentuk material yang dapat diamati secara langsung. Pembangunan fisik dapat dipahami sebagai serangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang dilaksanakan secara terencana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas fisik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.5 Teori Pembangunan Infrastruktur**

Menurut Makarim (2017), pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang berfungsi menciptakan kondisi dasar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan fasilitas yang dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan mobilitas, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan penting. Secara konseptual, infrastruktur mencakup berbagai jenis fasilitas fisik seperti jaringan jalan, jembatan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, energi, serta infrastruktur digital.

## **2.6 Konsep Efektivitas**

Efektivitas berkaitan erat dengan realisasi tujuan atau sasaran kebijakan, yang sering kali disebut sebagai hasilguna. Efektivitas menggambarkan hubungan antara keluaran hasil dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif apabila pelaksanaannya berhasil memenuhi tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan tersebut (*spending wisely*). Indikator efektivitas menunjukkan sejauh mana jangkauan dampak dan akibat (*outcome*) yang dihasilkan dari keluaran (*output*) program dalam

mencapai tujuan yang telah ditentukan (Grigg, 1988). Tingkat efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana output yang dihasilkan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan; semakin besar kontribusi output tersebut terhadap realisasi tujuan, maka efektivitasnya akan semakin tinggi. Efektivitas lebih menekankan pada hasil (outcome), di mana suatu program atau kegiatan dianggap efektif jika output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Hasan, 2025).

Menurut Felancia (2023) rasio efektivitas mencerminkan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana yang telah disusun dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menjelaskan potensi nyata yang dimiliki oleh daerah tersebut.

**Tabel 2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah**

Efektivitas keuangan Daerah	Kriteria
$\geq 100\%$	Sangat efektif
$>90-100$	Efektif
$>80-90$	Cukup efektif
$>60-80$	Kurang efektif
$\leq 60$	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini memakai teknik analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa time series dari tahun 2017 sampai tahun 2024

#### 3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan perencanaan dan realisasi pembangunan fisik di Kota Manado.
2. Sumber data dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD, Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen pemantauan-evaluasi.

#### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui metode dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Observasi atau mengadakan pengamatan secara langsung dengan masyarakat kota Manado terkait pengalokasian APBD di kota Manado
2. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi terkait perencanaan dan realisasi pembangunan fisik di Kota Manado. analisis dokumen untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen, baik cetak maupun elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan fisik oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan ketersediaan anggaran. Dalam penelitian ini, perencanaan pembangunan diukur menggunakan skala ordinal, yaitu menilai tingkat perencanaan yang diterapkan, seperti rendah, sedang, atau tinggi.
2. Realisasi pembangunan merupakan pelaksanaan atau eksekusi dari rencana pembangunan yang telah disusun. Dalam penelitian kualitatif ini, realisasi pembangunan diukur menggunakan skala ordinal.

3. Pelaksanaan pembangunan fisik merupakan tahap implementasi dari rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah hingga menghasilkan output fisik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

### 3.5 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam proses perencanaan, implementasi, dan realisasi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Manado, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018) bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap signifikansi serta dinamika fenomena sosial. Metode ini mencakup kajian mulai dari tahapan perencanaan, alokasi anggaran, hingga faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan, dengan penekanan pada isu-isu aktual tanpa intervensi data sehingga menghasilkan data yang objektif dan autentik. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi pustaka (library research) yang mengkaji berbagai sumber tertulis relevan, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi instansi pemerintah. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memberikan landasan teoritis dan konseptual yang kuat dalam menganalisis kontribusi perencanaan dan realisasi pembangunan terhadap peningkatan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Manado.

### 3.6 Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui metode analisis deskriptif, dengan fokus utama pada dimensi efektivitas. Analisis ini dimaksudkan untuk mengilustrasikan tingkat kemampuan Pemerintah Kota Manado dalam merealisasikan alokasi dana keuangan pada pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan, serta melakukan perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil yang tersedia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus dengan objek penelitian yang spesifik, sehingga memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati. Pengukuran efektivitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{target anggaran}} \times 100\%$$

#### Keterangan:

Realisasi = Jumlah atau capaian aktual pembangunan jalan tiap tahun.

Target = Nilai yang telah direncanakan sebelum pelaksanaan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Efektivitas Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado

Pengukuran efektivitas pembangunan jalan di Kota Manado selama periode 2017–2024 menggunakan Analisis Efektivitas yang menekankan kesesuaian antara realisasi anggaran dan target anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Efektivitas dianggap tercapai ketika realisasi anggaran mencapai nilai yang identik atau mendekati target yang ditetapkan. Rumus untuk mengukur efektivitas tersebut dapat diperhatikan sebagai berikut:

Tahun 2017	$\frac{6.458.273.500}{6.458.273.500} \times 100\% = 100\%$
Tahun 2018	$\frac{21.625.879.379}{21.625.879.379} \times 100\% = 100\%$
Tahun 2019	$\frac{6.925.369.285}{6.925.369.285} \times 100\% = 100\%$
Tahun 2020	$\frac{598.152.741}{598.152.741} \times 100\% = 100\%$
Tahun 2021	$\frac{1.093.035.000}{1.093.035.000} \times 100\% = 100\%$
Tahun 2022	$\frac{199.750.000}{199.750.000} \times 100\% = 100\%$
Tahun 2023	$\frac{3.460.859.052}{3.460.859.052} \times 100\% = 100\%$
Tahun 2024	$\frac{1.076.156.552}{1.076.156.552} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh hasil tahun 2017-2024 dana pembangunan fisik jalan di kota Manado dipergunakan dengan Efektif. Dengan demikian untuk dapat memperjelas maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3 Alokasi Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2017**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Jalan Kelurahan Sumompo	Kecamatan Tuminting	2017	980.265.000
2	Pembangunan Jalur Hijau Jl. Pierre Tendeau	Kecamatan Wenang	2017	3.571.362.500
3	Pembangunan Talud Pengaman Ke Komplek Sabuah Lansia Kec.Wanea (Lanjutan)	Kecamatan Wanea	2017	988.990.000
4	Pembangunan Jalan SMKN 6	Kecamatan Wanea	2017	917.656.000
Jumlah				6.458.273.500

Sumber : PUPR Kota Manado (2017)

Alokasi anggaran terbesar tahun 2017 ditujukan untuk Pembangunan Jalur Hijau Jalan Pierre Tendeau di Kecamatan Wenang senilai Rp 3.571.362.500, mencerminkan prioritas pemerintah terhadap infrastruktur hijau dan penataan estetika di koridor utama Kota Manado. Tiga kegiatan lainnya memiliki alokasi yang relatif seimbang, yaitu Talud Pengaman Kompleks Sabuah Lansia (Rp 988.990.000), Jalan Kelurahan Sumompo (Rp 980.265.000), dan Jalan SMKN 6 (Rp 917.656.000), yang kesemuanya berfungsi meningkatkan aksesibilitas permukiman, fasilitas sosial, dan pendidikan.

**Tabel 4 Alokasi Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2018**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Jalan - Jalan Wolter Monginsidi (Lajur Evakuasi dan Gawat Darurat)	Kec. Malalayang	2018	1.972.001.000
2	Pembangunan Jalan - Jalan Kelurahan Taas Bun II menuju Ring Road ( <i>DEBT SWAP</i> )	Kec. Tikala	2018	13.808.878.379
3	Pembangunan Jalan - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Timur ( <i>DEBT SWAP</i> )	Kec. Malalayang	2018	2.910.000.000
4	Pembangunan Jalur Hijau Jalan Pierre Tendeau (Tahap 2)	Kec. Wenang	2018	2.935.000.000
Jumlah				21.625.879.379

Sumber : PUPR Kota Manado (2018)

Pada tahun 2018, alokasi anggaran terbesar ditujukan untuk Pembangunan Jalan Kelurahan Taas Bun II menuju Ring Road di Kecamatan Tikala senilai Rp 13.808.878.379, mencerminkan prioritas peningkatan konektivitas wilayah. Dua dari empat kegiatan pembangunan menggunakan skema pembiayaan DEBT SWAP dengan total Rp 16.718.878.379 atau sekitar 77,3% dari total anggaran, menunjukkan inovasi dan diversifikasi sumber pendanaan. Kecamatan Malalayang mendapat perhatian khusus melalui dua proyek jalan, termasuk Jalan Wolter Monginsidi sebagai jalur evakuasi darurat yang penting mengingat Kota Manado berada di kawasan rawan bencana. Dibandingkan tahun 2017 yang berfokus di Tuminting, Wenang, dan Wanea, tahun 2018 memperluas cakupan ke Malalayang, Tikala, dan Wenang sebagai wujud pemerataan pembangunan. Keberlanjutan proyek dari tahun sebelumnya juga tetap dijaga, mencerminkan pendekatan pembangunan yang sistematis dan terencana. Secara keseluruhan, tahun 2018 menandai akselerasi pembangunan infrastruktur jalan Kota Manado yang lebih matang, mencakup aspek konektivitas, mitigasi bencana, dan keberlanjutan proyek.

**Tabel 5 Alokasi Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2019**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Talud Penahan Jalan	Depan Gereja Kalvari Karombasan Utara	2019	496.567.000
2	Pembangunan Jalan	Jl. Kelurahan Tongkeina	2019	989.263.331
3	Pembangunan Jalan	Jalan Kelurahan Bengkol - Kima Atas	2019	1.438.490.000
4	Pembangunan Talud Pengaman	Kantor PLK	2019	196.495.000
5	Pembangunan Talud Pengaman	Kanisah Gereja El Manibang	2019	191.600.000
6	Pembangunan Jalan	Jalan Wolter Monginsidi (Lajur Evakuasi dan Gawat Darurat) Tahap 2	2019	2.908.738.000
7	Pembangunan Jalan	Jalan Kelurahan Tongkeina Tahap 2	2019	704.215.954
Jumlah				6.925.369.285

Sumber : PUPR Kota Manado (2019)

Berdasarkan Tabel 5, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Manado mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.925.369.285 untuk tujuh kegiatan pembangunan fisik jalan yang tersebar di berbagai wilayah kota. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua jenis kegiatan utama, yaitu pembangunan jalan senilai Rp6.040.707.285 (87,2%) dan pembangunan talud penahan serta pengaman jalan senilai Rp884.662.000 (12,8%). Kegiatan dengan alokasi terbesar adalah Pembangunan Jalan Wolter Monginsidi (Lajur Evakuasi dan Gawat Darurat) Tahap 2 sebesar Rp2.908.738.000, yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam infrastruktur keselamatan dan mitigasi bencana. Sementara alokasi terkecil diberikan pada Pembangunan Talud Pengaman Kanisah Gereja El Manibang sebesar Rp191.600.000, yang tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan struktur jalan.

**Tabel 6 Alokasi Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2020**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Tiang Penyangga dan Talud Jalan Kelurahan Winangun Dua Lingkungan I,II,III	Kec. Malalayang	2020	197.150.000
2	Pembangunan Jalan - Jl. Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VII	Kec. Singkil	2020	196.890.000
3	Pembangunan Jalan - Jl. Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VI	Kec. Singkil	2020	204.112.741
Jumlah				598.152.741

Sumber : PUPR Kota Manado (2020)

Tahun 2020 menjadi periode penuh tantangan bagi pembangunan infrastruktur di Kota Manado akibat dampak pandemi COVID-19 yang memicu refocusing anggaran daerah, sehingga alokasi dana pembangunan fisik jalan mengalami penyesuaian signifikan. Meski demikian, pemerintah tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah yang memiliki kebutuhan mendesak, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk. Di Kelurahan Winangun Dua, dibangun tiang penyangga dan talud jalan guna memperkuat stabilitas struktur jalan di kawasan berkontur berbukit.

**Tabel 7 Alokasi Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2021**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Jalan Hotmix - Jl. Paniki Dua (Akses Pekuburan)	Kec. Mapanget	2021	1.093.035.000
Jumlah				1.093.035.000

Sumber : PUPR Kota Manado (2021)

Tabel 7, anggaran pembangunan fisik jalan di Kota Manado tahun 2021 tercatat sebesar Rp 1.093.035.000 dengan hanya satu kegiatan, yaitu jalan hotmix di Jl. Paniki Dua, Kec. Mapanget. Nilai ini lebih tinggi dibanding tahun 2020 (Rp 598 juta), namun masih jauh di bawah realisasi tahun 2018–2019. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, yang mengakibatkan banyak proyek infrastruktur ditunda atau dikurangi.

**Tabel 8 Alokasi Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2022**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Kelurahan Ranotana Weru Lingkungan 3	Kec. Wanea	2022	199.750.000
Jumlah				199.750.000

Sumber : PUPR Kota Manado (2022)

Tahun 2022, alokasi anggaran pembangunan fisik jalan dari APBD Kota Manado hanya sebesar Rp 199.750.000, menjadikannya alokasi terkecil sepanjang periode 2017–2024. Dalam periode 2021–2022, pemerintah lebih memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur yang ada, termasuk pembangunan talud penahan jalan di wilayah rawan longsor dan berkontur miring. Fokus ini mencerminkan pergeseran prioritas ke arah mitigasi risiko dan stabilitas infrastruktur jalan. Berbeda dengan tahun 2017–2021 yang umumnya mencakup pembangunan jalan baru, peningkatan jalan, perbaikan drainase, dan rehabilitasi jalur hijau.

**Tabel 9 Alokasi Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2023**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Jalan (TMMD)	Kec. Mapanget	2023	770.000.000
2	Pembuatan Tanggul Badan Jalan Kombos Timur	Kec. Singkil	2023	2.300.055.971
3	Pembangunan Jalan - Jl. Kel. Bailang Lingkungan 2	Kec. Bunaken	2023	201.793.081
4	Pembuatan Talud Penahan Badan Jalan - Jl Edigagola	Kec. Singkil	2023	189.010.000
Jumlah				3.460.859.052

Sumber : PUPR Kota Manado (2023)

Pada tahun 2023, alokasi pembangunan fisik jalan di Kota Manado meningkat dibanding 2021–2022, mencakup empat kegiatan di tiga kecamatan (Mapanget, Singkil, Bunaken), dengan proyek terbesar berupa pembuatan tanggul badan jalan Kombos Timur senilai Rp 2,3 miliar. Peningkatan ini mencerminkan prioritas penguatan struktur jalan demi stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Meski demikian, angka 2023 masih jauh di bawah puncak alokasi tahun 2017–2018 yang mencapai Rp 6,45 M hingga Rp 21,62 M, akibat dampak refocusing anggaran selama pandemi 2020–2022. Tahun 2023 menjadi tahap pemulihan dengan fokus pemerataan pembangunan jalan baru, tanggul, dan talud di beberapa kecamatan.

**Tabel 10 Alokasi Pembangunan fisik Jalan di Kota Manado Tahun 2024**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Jalan - Jl. Kel. Malalayang Satu Barat Lk.IX	Kec. Malalayang	2024	199.940.000
2	Pembangunan Jalan - Jl. Kel. Kairagi Dua Lk. I	Kec. Mapanget	2024	199.896.000
3	Pembangunan Jalan - Jl. Kel. Malalayang Satu Timur Lk. 6 (Komp. GMIM Sobat Kristus)	Kec. Malalayang	2024	198.929.000
4	Pembangunan Jalan - Jl. Menuju Hanggar Dinas PUPR Manado	Kec. Mapanget	2024	477.391.552
Jumlah				1.076.156.552

Sumber : PUPR Kota Manado (2024)

Berdasarkan Tabel 10 Pada tahun 2024, seluruh kegiatan pembangunan fisik jalan difokuskan pada pembangunan jalan baru yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Mapanget. Berbeda dengan tahun 2023 yang memiliki variasi kegiatan meliputi pembangunan jalan, pembuatan tanggul, dan pembuatan talud, tahun 2024 lebih terfokus pada satu jenis kegiatan yaitu pembangunan jalan. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan prioritas pembangunan dari penguatan struktur jalan menjadi perluasan jaringan jalan di Kota Manado. Kegiatan dengan alokasi anggaran terbesar pada tahun 2024 adalah Pembangunan Jalan Menuju Hanggar Dinas PUPR Manado di Kecamatan Mapanget dengan anggaran sebesar Rp477.391.552. Pembangunan jalan ini memiliki nilai strategis karena mendukung aksesibilitas menuju fasilitas pemerintahan yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Manado.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Efektivitas Penggunaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan di Kota Manado

Berdasarkan hasil efektivitas pembangunan jalan di Kota Manado tahun 2017–2024, realisasi anggaran setiap tahun selalu mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Manado mampu mengelola anggaran pembangunan jalan secara optimal sesuai perencanaan. Konsistensi nilai efektivitas pada angka maksimum menunjukkan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan berjalan terukur dan tepat sasaran. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan pada periode tersebut terlaksana dengan sangat efektif karena tidak terdapat selisih antara target dan realisasi anggaran.

**Tabel 11 Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Manado 2017-2024**

Tahun	Target Dana / Anggaran (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2017	6.458.273.500	6.458.273.500	100%	Efektif
2018	21.625.879.379	21.625.879.379	100%	Efektif
2019	6.925.369.285	6.925.369.285	100%	Efektif
2020	598.152.741	598.152.741	100%	Efektif
2021	1.093.035.000	1.093.035.000	100%	Efektif
2022	199.750.000	199.750.000	100%	Efektif
2023	3.460.859.052	3.460.859.052	100%	Efektif
2024	1.076.156.552	1.076.156.552	100%	Efektif

Sumber : PUPR Kota Manado (2024)

Efektivitas pada tabel ini mengacu pada rasio realisasi terhadap target anggaran pembangunan fisik jalan, di mana nilai 100% menunjukkan program terlaksana sesuai rencana dan dikategorikan efektif. Kolom keterangan menjelaskan fokus pembangunan, prioritas kecamatan, serta jenis kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. Tabel ini memperlihatkan pola alokasi anggaran yang variatif dari tahun ke tahun, mencakup pembangunan jalan baru, perbaikan talud, dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini

mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Manado dalam melaksanakan pembangunan fisik jalan secara konsisten dan terencana.

#### **4.2.2 Proses Perencanaan Dan Realisasi Pembangunan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Jalan di Kota Manado**

Perencanaan pembangunan jalan di Kota Manado periode 2017–2024 dilaksanakan secara sistematis berpedoman pada RPJMD, Renstra Dinas PUPR, serta melibatkan forum Musrenbang berjenjang sebagai wadah partisipasi masyarakat, dengan seluruh usulan dituangkan dalam RKPD dan dibiayai melalui APBD. Realisasi pembangunan dilaksanakan oleh Dinas PUPR melalui mekanisme pengadaan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018, mencakup peningkatan jalan lingkungan, pengaspalan ulang, pembangunan jalan beton, hingga pembukaan akses jalan baru di wilayah yang belum terlayani. Pelaksanaan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fiskal, kondisi geografis berbukit, serta refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 pada 2020–2021, meskipun program-program strategis tetap dipertahankan berdasarkan skala prioritas.

#### **4.2.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembangunan Fisik Jalan di Kota Manado**

##### **4.2.3.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembangunan fisik Jalan**

Pelaksanaan pembangunan fisik jalan di Kota Manado periode 2017–2024 dapat terlaksana secara efektif berkat dukungan sistem perencanaan yang komprehensif dan terstruktur. Pemerintah Kota Manado menyusun jalan perencanaan pembangunan berlandaskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR sebagai acuan teknis operasional. Proses perencanaan ini juga melibatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat masyarakat, kecamatan, hingga kota, sehingga setiap program pembangunan jalan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Dinas PUPR sebagai lead sector menyelenggarakan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sehingga proses pelaksanaan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Koordinasi yang solid antarinstansi terbukti mampu mengatasi berbagai kendala lapangan seperti penyelesaian lahan, kondisi cuaca ekstrem, maupun tantangan teknis lainnya, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.

##### **4.2.3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan fisik Jalan**

Pelaksanaan pembangunan fisik jalan di Kota Manado periode 2017–2024, terdapat sejumlah faktor penghambat yang secara nyata mempengaruhi kelancaran dan kesinambungan program pembangunan infrastruktur. Salah satu kendala yang paling signifikan adalah keterbatasan anggaran yang terjadi akibat realokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19, terutama pada tahun 2020 dan 2022. Kondisi ini menyebabkan alokasi anggaran pembangunan fisik jalan mengalami penurunan drastis, di mana realisasi terendah tercatat pada tahun 2022 hanya sebesar Rp199,7 juta, jauh lebih kecil dibandingkan alokasi tahun-tahun sebelumnya. Refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk kebutuhan darurat pandemi secara langsung menghambat target pembangunan infrastruktur jalan yang telah direncanakan, sehingga sejumlah program pembangunan harus mengalami penyesuaian prioritas dan tertundanya pelaksanaan di lapangan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode analisis efektivitas yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

### **1. Proses Perencanaan dan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Proses perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Manado dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian realisasi anggaran dari tahun 2017 hingga 2024 secara konsisten mencapai 100% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tersebut telah dijalankan dengan tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, termasuk peningkatan mobilitas, kemudahan aksesibilitas ke fasilitas publik, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi.

### **2. Efektivitas Penggunaan Anggaran**

Tingkat efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan jalan telah dimanfaatkan secara optimal. Data dari analisis efektivitas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pembangunan fisik jalan di Kota Manado setiap tahunnya secara konsisten mencapai 100% dari target

yang telah ditetapkan, mulai tahun 2017 hingga 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Manado mampu mengelola dan menyerap anggaran secara optimal sesuai perencanaan, sehingga dapat dinilai sangat efektif berdasarkan penilaian kriteria efektivitas keuangan daerah.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan

Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pembangunan mencakup perencanaan yang komprehensif, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan yang efisien. Sementara itu, kendala seperti sengketa lahan, kondisi cuaca, dan hambatan teknis dapat diatasi melalui tanggung jawab pemerintah, sebagaimana dibuktikan bahwa hambatan proyek dapat diselesaikan dengan cepat.

### 4. Dampak Pembangunan Jalan terhadap Masyarakat

Peningkatan kualitas jalan yang substansial telah dialami secara langsung oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan jalan memberikan kontribusi nyata, baik dari segi fisik maupun fungsional, meliputi aspek keamanan, kenyamanan dalam berkendara, efisiensi waktu perjalanan, serta peningkatan mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Makarim. (2017). *Manajemen Infrastruktur: Isu Dan Kebijakan*. Jakarta: Grup Prenadamedia.
- Bank Pembangunan Asia. (2020). *Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Inklusif Di Asia Dan Pasifik*. Manila.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th Ed.). Sage Publications.
- Darmawan, & Solihin, M. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pembangunan Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Journal Ak-99*.
- Felancia, L. Y. (2023). Analisis Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng Tahun 2017-2021. *Jurnal Of Economic And Social Empowerment*, 94-105. Retrieved
- Grigg, & NS. (1988). *Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur*. New York: John Wiley & Sons.
- Hasan, M. W., Raudatillah, & Pauzi. (2025). *Dalam Penelitian Berjudul "Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan"*.
- Kodoatie, & RJ. (2010). *Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Panggabean, F. Y., Dalimunthe, M. B., Ramli, R., Magdalena, L., & Lingga, R. D. (2023). Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kota Medan. *Jurnal ilmiah dinamika sosial*. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/4184>
- Putri, A. O., Sirojuzilam, & Kadir, A. (2018). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rama, H. A., & Endarti, E. W. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Goreng Meni Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Inovasi Sektor Publik*.
- Riyadi, Bratakusumah, & Supriady, D. (2007). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Rizal, A., Apriliani, I. M., & Permana, R. (2020). Sustainability Assessment Of Coastal Development In Southern Region Of West Java Province , Indonesia. *Jurnal Geojournal Of Tourism And Geosite*.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2019). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (Edisi 3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sibali, A., Erhanuddin, & Jainuddin. (2025). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kepulauan Selayar. *Journal Of Social Science Research*. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17503>
- Sjafrizal. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Rajawali Pers.
- Soares, A., Nurpratiwi , R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Todaro, M. P., & Smith,, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). *Pearson*.
- Widodo. (2011). Manajemen Proyek Infrastruktur: Tahapan Perencanaa. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wurara, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Retrieved From <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksekutif/Article/View/31423>